

PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA KELAS IB

LAPORAN KEUANGAN

Bagian Anggaran 005.03

**Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021**



Jl. Letnan Akhmedi No. D-80 Purbalingga

Purbalingga - Jawa Tengah 53316

Telp. (0281) 891009 Fax. (0281) 895668

e-mail : pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id



LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
KELAS IB

Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2021

BAGIAN ANGGARAN 005.03

BADAN PERADILAN UMUM

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

Jl. Letnan Akhmadi No. D-80 Purbalingga

Telp. (0281) 891009 Fax. (0281) 895668

Purbalingga - Jawa Tengah 53316

e-mail : pengadilannegeri.purbalingga@yahoo.co.id

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Purbalingga adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Purbalingga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan.

Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/ pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Pengadilan Negeri Purbalingga.

Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Purbalingga, 19 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran



Beti Harfiah, SH

196804211989032001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	9
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	10
V. Catatan Atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	11
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	20
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	27
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	38
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	42
F. Pengungkapan Penting Lainnya	46
VI. Lampiran dan Daftar	



**Mahkamah Agung RI
Pengadilan Negeri Purbalingga**

Jl. Letnan Akhmadi D-80, Purbalingga

Telepon : (0281) 891009, Faximile : (0281) 895668

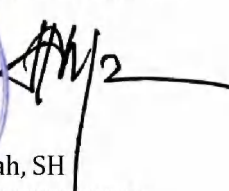
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tingkat Pengadilan Negeri Purbalingga yang terdiri dari : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2021 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Purbalingga, 19 Januari 2022

Kuasa Pengguna Anggaran




Bati Harfiah, SH

196804211989032001

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun Anggaran 2019 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1 Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2021.

Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2021 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp. 38,120,000 atau mencapai 134 % dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp. 28,550,000.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2021 adalah sebesar Rp.92,905,800 atau mencapai 97 % dari alokasi anggaran sebesar Rp. 95,468,000.

2 Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2021.

Nilai Aset per 31 Desember 2021 dicatat dan disajikan sebesar Rp. 395,500 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp. 395,500; Aset Tetap (neto) sebesar Rp. 0; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp. 0; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp. 0.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 395,500.

3 Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 38,120,000, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp. 98,644,552 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp. -60,524,552.

Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp. 0 dan sebesar Rp. 0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp. -60,524,552.

4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2021 adalah sebesar Rp.766,200 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp.-60,524,552 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp. 0 dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp. 60,153,852 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2021 adalah senilai Rp. 395,500.

5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2021 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Pengadilan Negeri Purbalingga
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021		% thd Angg	TA 2020 Realisasi
		Anggaran	Realisasi		
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	28,550,000	38,120,000	133.52	32,615,500
JUMLAH PENDAPATAN		28,550,000	38,120,000	133.52	32,615,500
BELANJA					
	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	- 0		-
Belanja Barang	B.4	95,468,000	92,905,800	97.32	98,459,750
Belanja Modal	B.5	-	- 0		-
Belanja Bantuan Sosial	B.6	-	-		-
JUMLAH BELANJA		95,468,000	92,905,800	97.32	98,459,750

Pengadilan Negeri Purbalingga
NERACA

PER 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021	TA 2020
ASET			
Aset Lancar			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	0	0
Uang Muka Belanja (Prepayment)	C.2	-	-
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.3	0	0
Piutang Bukan Pajak	C.4	0	0
Bagian Lancar TP/TGR	C.5	-	-
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.6	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	C.7	-	-
Belanja Dibayar di Muka	C.8	-	-
Pendapatan yang Masih Harus diterima	C.9	0	0
Persediaan	C.10	395,500	766,200
Jumlah Aset lancar		395,500	766,200
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Tagihan TP/TGR	C.11	-	-
Tagihan Penjualan Angsuran	C.12	-	-
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Jangka Panjang	C.13	-	-
Jumlah Piutang Jangka Panjang		-	-
ASET TETAP			
Tanah	C.14	0	0
Peralatan dan Mesin	C.15	0	0
Gedung dan Bangunan	C.16	0	0
Jalan, Irigasi dan Bangunan	C.17	0	0
Aset Tetap Lainnya	C.18	0	0
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.19	0	0
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.20	0	0
Jumlah Aset Tetap		-	-
ASET LAINNYA			
Aset Tidak Berwujud	C.21	0	0
Aset Lain-lain	C.22	0	0
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.23	-	-
Jumlah Aset Lainnya		-	-
JUMLAH ASET		395,500	766,200

KEWAJIBAN					
Kewajiban Jangka Pendek					
Uang Muka dari KPPN	C.24	0		0	
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.25	0		0	
Pendapatan Diterima di Muka	C.26	0		0	
Beban yang Masih Harus Dibayar	C.27			-	-
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek				-	-
JUMLAH KEWAJIBAN				-	-
EKUITAS					
Ekuitas	C.28	Rp	395,500	Rp	766,200
Jumlah Ekuitas			395,500		766,200
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS			395,500		766,200

III. LAPORAN OPERASIONAL

Pengadilan Negeri Purbalingga
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021	TA 2020
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.1	38,120,000	32,615,500
JUMLAH PENDAPATAN		38,120,000	32,615,500
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	0	-
Beban Persediaan	D.3	48,038,752	47,309,880
Beban Barang dan Jasa	D.4	29,775,800	34,761,550
Beban Pemeliharaan	D.5	0	-
Beban Perjalanan Dinas	D.6	20,830,000	20,930,000
Beban Barang Untuk Diserahkan Pada Masyarakat	D.7	-	-
Beban Bantuan Sosial	D.8	-	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	-
Jumlah Beban		98,644,552	103,001,430
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(60,524,552)	(70,385,930)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
	D.11		
Surplus Pelepasan aset Non Lancar		-	-
Defisit Pelepasan aset Non Lancar		-	-
Defisit Selisih Kurs		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	245,500
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		-	245,500
SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		(60,524,552)	(70,140,430)
POS LUAR BIASA			
	D.12		
Pendapatan PNPB		-	-
Beban Perjalanan Dinas		-	-
Beban Persediaan		-	-
SURPLUS / DEFISIT LO		(60,524,552)	(70,140,430)

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengadilan Negeri Purbalingga
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 Desember 2021 DAN 2020

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2021	TA 2020
EKUITAS AWAL	E.1	766,200	194,000
SURPLUS / DEFISIT LO	E.2	(60,524,552)	(70,140,430)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.3		
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI / KESALAHAN MENDASAR	E.3.1		
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.3.2	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.3.3	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.3.4	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI	E.3.5	-	-
KOREKSI LAIN-LAIN	E.3.6	-	-
JUMLAH		-	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	60,153,852	70,712,630
EKUITAS AKHIR	E.5	395,500	766,200

<i>Dasar Hukum</i> <i>Entitas dan</i> <i>Rencana Strategis</i>	A. PENJELASAN UMUM A. 1. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Purbalingga Visi Pengadilan Negeri Purbalingga adalah Terwujudnya Pengadilan Negeri Purbalingga Yang Agung, yang bertujuan agar Pengadilan Negeri Purbalingga menjadi lembaga yang dihormati, dimana di dalamnya dikelola oleh hakim dan pegawai yang memiliki kemuliaan dan kebesaran serta keluhuran sikap dan jiwa dalam melaksanakan tugas pokoknya, yaitu memutus perkara. Misi Pengadilan Negeri Purbalingga adalah: 1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan. 2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan. 3. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) badan peradilan. 4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi badan peradilan. Untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut Pengadilan Negeri Purbalingga melakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut: 1. Meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan 2. Meningkatkan pengawasan di semua bidang 3. Meningkatkan profesionalisme sumber daya peradilan 4. Meningkatkan kinerja aparat peradilan. 5. Meningkatkan kepedulian terhadap kesehatan dilingkungan kantor.
<i>Pendekatan</i> <i>Penyusunan</i> <i>Laporan Keuangan</i>	A. 2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan Laporan Keuangan Tahun 2021 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Purbalingga. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

Basis Akuntansi

A. 3. Basis Akuntansi

Pengadilan Negeri Purbalingga menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A. 4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi**A. 5. Kebijakan Akuntansi**

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2021 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI yang merupakan entitas pelaporan dari Pengadilan Negeri Purbalingga.

Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Purbalingga adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1). Pendapatan - LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2). Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:
 - ✓ Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - ✓ Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa
 - ✓ Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3). Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4). Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5). Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (net realizable value). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - √ harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - √ harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - √ harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
 - Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a) Tanah;
 - b) Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
 - Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
 - Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
 - Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.
- Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musuk Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor : 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat . Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut :

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol III, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Pengadilan Negeri Purbalingga telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Hal ini disebabkan oleh adanya program penghematan belanja pemerintah dan adanya perubahan kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan situasi serta kondisi pada saat pelaksanaan. Perubahan tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2021	
	Anggaran Awal	Anggaran Setelah Revisi
Pendapatan		
Pendapatan Jasa	-	-
Pendapatan Lain-lain	28,550,000	28,550,000
Jumlah Pendapatan	28,550,000	28,550,000
Belanja		
Belanja Pegawai	-	-
Belanja Barang	121,005,000	95,468,000
Belanja Bantuan Sosial	-	-
Belanja Modal	-	-
Jumlah Belanja	121,005,000	95,468,000

Realisasi
Pendapatan Rp.
38,120,000.

B. 1. Pendapatan

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 38,120,000 atau mencapai 133.52 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 28,550,000.

Pendapatan Pengadilan Negeri Purbalingga terdiri dari Pendapatan Jasa dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
PENDAPATAN SEWA	-	-	-
PENDAPATAN LAIN-LAIN	28,550,000	38,120,000	133.52
Jumlah	28,550,000	38,120,000	133.52

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Realisasi Pendapatan Lain-Lain TA 2021 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan TA 2020." dikarenakan sumber pendapatan dari banyaknya masyarakat pencari keadilan di wilayah Purbalingga dalam mencari surat keterangan bebas pidana untuk melamar sebagai perangkat desa.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Semester I TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
PENDAPATAN SEWA	-	-	-
PENDAPATAN LAIN-LAIN	38,120,000	32,615,500	17
Jumlah	38,120,000	32,615,500	17

Realisasi Belanja
Negara Rp.
92,905,800.

B. 2. Belanja

Realisasi Belanja instansi pada TA 2021 adalah sebesar Rp. 92,905,800 atau 97 dari anggaran belanja sebesar Rp. 95,468,000. Rincian anggaran dan realisasi belanja TA 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Anggaran dan Belanja TA 2021

Uraian	2021		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Pegawai	-	-	-
Belanja Barang	95,468,000	92,905,800	97.32
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Belanja Modal	-	-	-
Total Belanja Kotor	95,468,000	92,905,800	97.32
Pengembalian		-	-
Jumlah	95,468,000	92,905,800	97.32

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Dibandingkan dengan TA 2020, Realisasi Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar -5.64 % dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan jumlah perkara yang diputus masih jauh dari target

Perbandingan Realisasi Belanja TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
Belanja Pegawai	Rp -	Rp -	-
Belanja Barang	Rp 92,905,800	Rp 98,459,750	-5.64
Belanja Bantuan Sosial	Rp -	Rp -	-
Belanja Modal	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp 92,905,800	Rp 98,459,750	-5.64

Belanja Pegawai
Rp. 0.

B. 3. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Belanja Pegawai Semester I TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	-	-	-
Belanja Gaji dan Tunjangan Non PNS	-	-	-
Belanja Honorarium	-	-	-
Belanja Lembur	-	-	-
Belanja Vakasi	0	0	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Pegawai	-	-	-
Jumlah	-	-	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Belanja Barang
Rp. 92,905,800.*

B. 4. Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 92,905,800 dan Rp. 98,459,750. Realisasi Belanja Barang TA 2021 mengalami penurunan -6 % dari Realisasi Belanja Barang TA 2020.

Hal ini antara lain disebabkan :

1. Jumlah perkara yang diputus masih jauh dari target.
2. Penyebaran pandemi covid-19 sehingga persidangan perkara pidana dilakukan dilakukan secara daring/online akibatnya konsumsi makan terdakwa dan pengamanan kepolisian tidak terserap sejak Januari 2021

Perbandingan Belanja Barang Semester I TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
Belanja Barang Operasional	1,855,800	1,325,000	40.06
Belanja Barang Non Operasional	6,800,000	12,041,550	(43.53)
Belanja Jasa	21,120,000	21,395,000	(1.29)
Belanja Pemeliharaan	-	-	-
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	20,830,000	20,930,000	(0.48)
Belanja Barang Persediaan	42,300,000	42,768,200	(1.09)
Jumlah Belanja Kotor	92,905,800	98,459,750	(5.64)
Pengembalian Belanja Barang	-	-	-
JUMLAH	92,905,800	98,459,750	(5.64)

*Belanja Modal Rp.
0.*

B. 5. Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/ Turun %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	-	-	-
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Lainnya	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B. 5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi tersebut pada TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 % dibandingkan TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/ Turun %
Belanja Modal Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pembuatan Sertifikat Tanah	-	-	-
Belanja Modal Pengukuran dan Pematangan Tanah	-	-	-
Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian Belanja Modal	-	-	-
Jumlah	-	-	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. 5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Semester I TA 2021 adalah sebesar Rp. 0, mengalami penurunan sebesar 0 % bila dibandingkan dengan realisasi TA 2020 sebesar Rp. 0.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi 2021	Realisasi 2020	Naik/ Turun %
- Peralatan dan Mesin	-	-	-
- "	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B. 5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Realisasi Belanja Modal TA 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan sebesar 0 % dibandingkan Realisasi TA 2020.

Perbandingan Realisasi Bel. Gedung dan Bangunan TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
Gedung Tempat Kerja	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	-	-	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

B. 5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Realisasi Belanja Modal TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0 % dibandingkan Realisasi TA 2020.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal TA 2021 dan 2020

Uraian	Realisasi TA 2021	Realisasi TA 2020	Naik/ Turun %
Belanja Modal Jaringan	-	-	-
Belanja Modal Upah Naker dan Honor Pengelola Teknis Jaringan	-	-	-
Jumlah Belanja Kotor	-	-	-
Pengembalian	-	-	-
Jumlah	-	-	-

B. 5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 dan TA 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0 % dibandingkan Realisasi TA 2020.

B. 5.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0., pada KPPN Purwokerto tidak terdapat alokasi Belanja Bantuan Sosial.

Belanja bantuan sosial merupakan belanja pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif. Realisasi tersebut pada TA 2021 mengalami kenaikan sebesar 0 % dibandingkan TA 2020.

Belanja Bantuan Sosial yang disalurkan adalah dalam bentuk barang. Bantuan ini diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial yaitu rendahnya tingkat pendidikan yang disebabkan banyaknya daerah miskin.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C. 1 Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran Rp. 0.*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggung-jawabkan atau belum disetorkan ke Rekening Kas Negara per tanggal neraca.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran adalah sebagai berikut:

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran

Keterangan	2021	2020
Tunai	-	-
Rekening Bank	-	-
Kuitansi UP Belum di SPJkan	-	-
Jumlah	-	-

*Uang Muka
Belanja
(prepayment)
Rp.0.*

C. 2 Uang Muka Belanja (prepayment)

Saldo Uang Muka Belanja (prepayment) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Uang Muka Belanja (prepayment) merupakan persekot/ uang muka gaji yang dimintakan pegawai oleh karena mutasi/kepindahannya ke tempat kerja yang baru. Realisasi Uang Muka Belanja TA 2021 mengalami penurunan sebesar 0 % dibandingkan Realisasi TA 2020.

Rincian Uang Muka Belanja (prepayment)

Keterangan	2021	2020
Uang Muka Belanja (prepayment)	-	-
Jumlah	-	-

*Kas Lainnya dan
Setara Kas Rp. 0.*

C. 3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Rincian sumber Kas Lainnya dan Setara Kas pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas

Keterangan	2021	2020
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	-	-
Kas Lainnya di Bendahara Penerimaan	-	-
Kas Lainnya dari hibah yang belum disahkan	-	-
Jumlah	-	-

Piutang PNPB Rp. 0.

C. 4 Piutang PNPB

Saldo Piutang PNPB per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Piutang PNPB merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Rincian Piutang PNPB disajikan sebagai berikut:

Rincian Piutang PNPB

Keterangan	2021	2020
Piutang PNPB	-	-
Piutang PNPB Lainnya	-	-
Jumlah	-	-

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Rp. 0.

C. 5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Bagian Lancar TP/TGR merupakan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal pelaporan yang akan jatuh tempo dalam 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Bagian Lancar TPA Rp. 0.

C. 6 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar **C. 7**

Tak Tertagih -

Piutang Lancar Rp.

0.

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar

Kualitas Piutang	Nilai Piutang Jk Pendek	% Penyisihan	Nilai Penyisihan
Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10.00%	-
Diragukan	-	50.00%	-
Macet	-	100.00%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TP/TGR			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10.00%	-
Diragukan	-	50.00%	-
Macet	-	100.00%	-
Jumlah	-		-
Bagian Lancar TPA			
Lancar	-	0.50%	-
Kurang Lancar	-	10.00%	-
Diragukan	-	50.00%	-
Macet	-	100.00%	-
Jumlah	-		-
Jumlah Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-		-

Belanja Dibayar di Muka Rp. 0.

C. 8 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

Rincian Belanja dibayar dimuka TA 2021 dan 2020

Keterangan	2021	2020
Persekot Gaji	-	-
Pembayaran Sewa Peralatan Dan Mesin	-	-
Pembayaran Sewa Gedung Kantor	-	-
Jumlah	-	-

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp. 0.

C. 9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa.

Persediaan Rp. 395,500.

C. 10 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing adalah sebesar Rp. 395,500 dan Rp. 766,200.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut :

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Persediaan TA 2021 dan 2020

Jenis	2021	2020
Barang Konsumsi	395,500	766,200
Barang Untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Barang Persediaan untuk diserahkan pada masyarakat	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	395,500	766,200

Tagihan TP/TGR
Rp. 0.

C. 11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan
Angsuran Rp. 0.

C. 12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Tagihan Penjualan Angsuran adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara atas transaksi jual/beli aset tetap instansi.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Jangka
Panjang Rp. 0.

C. 13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Jangka Panjang per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Penyisihan Piutang Tak Tertagih– Piutang Jangka Panjang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan PA dan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Tanah Rp. 0.

C. 14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Pengadilan Negeri Purbalingga per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	-
Mutasi Tambah	-
Revaluasi Aset	-
Mutasi Kurang	-
Revaluasi Aset	-
Penyitaan Pengadilan	-
Saldo Per 31 Desember 2021	-

Rincian saldo Tanah per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

No	Luas	Lokasi	Nilai
1			-
2			-
3			-
4			-
5			-
6			-
7			-
8			-
Jumlah			-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Peralatan dan
Mesin Rp. 0.

C. 15 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	-
Mutasi Tambah	-
Pembelian	-
Penggunaan Kembali Barang Yang Dihentikan	-
Transfer Masuk	-
Koreksi Tambah	-
Mutasi Kurang	-
Penghentian dari Penggunaan	-
Diusulkan Penghapusan	-
Saldo Per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan sd 31 Des 2021	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2021	-

Gedung dan
Bangunan Rp. 0.

C. 16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2021	-
Mutasi Tambah	-
Pembangunan Tambahan Ruang	-
Mutasi Kurang	-
Saldo Per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2021	-

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Jalan, Jaringan
dan Irigasi Rp. 0.*

C. 17 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

*Aset Tetap Lainnya
Rp. 0.*

C. 18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 0. Tidak ada mutasi tambah maupun kurang atas aset tetap ini untuk Tahun 2021.

*Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp.
0.*

C. 19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian lebih lanjut terkait Konstruksi Dalam Pengerjaan disajikan dalam lampiran.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap Rp. 0.*

C. 20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2021 dan 2020

NO	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	-	-	-
2	Gedung dan Bangunan	-	-	-
3	Jalan, Irigasi Bangunan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Akumulasi Penyusutan		-	-	-

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada Lampiran A1 Laporan Keuangan ini.

Aset Tak Berwujud Tetap Rp. 0. **C. 21 Aset Tak Berwujud**

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik.

Aset Lain-Lain Tetap Rp. 0. **C. 22 Aset Lain-Lain**

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah Rp. 0 dan Rp. 0.

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2020	-
Mutasi Tambah	-
Reklasifikasi dari aset tetap	-
Mutasi Kurang	-
Penggunaan kembali BMN Yang dihentikan	-
Saldo Per 31 Desember 2021	-
Akumulasi Penyusutan sd. 31 Desember 2021	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2021	-

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya Rp. 0.

C. 23 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing Rp. 0 dan Rp. 0.

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Aset Tak Berwujud	-	-	-
Software Komputer	-	-	-
Jumlah	-	-	-
Aset Lain-Lain	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Uang Muka dari
KPPN Rp. 0.

C. 24 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang diberikan KPPN sebagai uang muka kejadian masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan.

Utang kepada
Pihak Ketiga Rp. 0.

C. 25 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada Pengadilan Negeri Purbalingga per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Uraian	Jumlah	Penjelasan
Belanja Langganan Listrik	-	-
Belanja Langganan Telepon	-	-
Belanja Langganan Air	-	-
Total	-	

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp. 0.

C. 26 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah diterima pembayarannya, namun barang/jasa belum diserahkan. Keseluruhan Pendapatan Diterima di Muka tersebut bersumber dari jasa konsultasi akuntansi yang jangka waktu kontraknya lebih dari satu tahun, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Pendapatan Diterima di Muka

Uraian	Nilai
Sewa Kantin	-
Total	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Beban yang
Masih Harus
Dibayar Rp.0.*

C. 27 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga (berupa langganan listrik, telepon dan air PDAM bulan Desember 2019) yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Belanja yang masih harus dibayar TA 2021 dan 2020

Jenis	2021	2020
Belanja Langganan Listrik	-	-
Bel. Barang yg masih harus dibayar	-	-
Bel. Modal yg masih harus dibayar	-	-
Jumlah	-	-

*Ekuitas Rp.
395,500.*

C. 28 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 395,500 dan Rp. 766,200.

Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp. 38,120,000.

D. 1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 38,120,000 dan Rp. 32,615,500. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Tahun 2021 dan 2020

Uraian	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun %
Pendapatan Jasa	-	-	-
Pendapatan Lain-lain	38,120,000	32,615,500	16.876945
Jumlah	38,120,000	32,615,500	16.876945

Pendapatan lain-lain berasal dari Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan, Pendapatan Ongkos Perkara, Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya.

Beban Pegawai
Rp. 0.

D. 2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Rincian Beban Pegawai Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun %
Beban Gaji	-	-	-
Beban Tunjangan -Tunjangan	-	-	-
Beban Honorarium dan Vakasi	-	-	-
Beban Lembur	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Persediaan
Rp. 48,038,752.

D. 3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 48,038,752 dan Rp. 47,309,880.

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Rincian Beban Persediaan Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun %
Beban Persediaan Konsumsi	48,038,752	47,309,880	1.54063
Beban Persediaan Bahan Baku untuk Pemeliharaan	-	-	-
Beban Persediaan Untuk Suku Cadang	-	-	-
Beban Persediaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	48,038,752	47,309,880	1.54063

*Beban Barang dan
Jasa Rp.
29,775,800.*

D. 4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 29,775,800 dan Rp. 34,761,550.

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Rincian Beban Barang dan Jasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun %
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	1,855,800	1,325,000	40.0604
Beban Bahan	6,350,000	12,041,550	-47.266
Beban Honor Output Kegiatan	450,000	-	-
Beban Jasa Konsultan	21,120,000	21,395,000	-1.2853
Beban Jasa Profesi	-	-	-
Beban Jasa Lainnya	-	-	-
Jumlah	29,775,800	34,761,550	-14.343

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban
Pemeliharaan Rp.
0.

D. 5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun %
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Pemeliharaan Lainnya	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Beban Perjalanan
Dinas Rp.
20,830,000.

D. 6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 20,830,000 dan Rp. 20,930,000.

Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun %
Beban Perjalanan Biasa	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	20,830,000	20,930,000	-0.4778
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	-	-	-
Jumlah	20,830,000	20,930,000	-0.4778

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

*Beban Barang
untuk Diserahkan
kepada
Masyarakat Rp. 0.*

D. 7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp. 0.*

D. 8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp. 0.*

D. 9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun %
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	-	-
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	-	-
Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
Jumlah Penyusutan	-	-	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud	-	-	-
Jumlah Amortisasi	-	-	-
Jumlah	-	-	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp. 0.

D. 10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode.

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun %
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Lancar	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih - Piutang Non Lancar	-	-	-
Jumlah	-	-	-

Surplus dari
Kegiatan Non
Operasional Rp. 0.

D. 11 Surplus dari Kegiatan Non Operasional

Pos Surplus dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok Dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Kegiatan Non Operasional Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun %
Surplus/Defisit Pelepasan aset Non Lancar	-	-	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	-	-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	-	-	-
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	-	-	-

Pos Luar Biasa
Rp. 0.

D. 12 Pos Luar Biasa

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Rincian Pos Luar Biasa untuk Tahun 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Rincian Pos Luar Biasa Tahun 2021 dan 2020

Uraian Jenis Beban	TA 2021	TA 2020	Naik/ Turun %
Pendapatan PNPB	Rp -	Rp -	-
Beban Perjalanan Dinas	Rp -	Rp -	-
Beban Persediaan	Rp -	Rp -	-
Jumlah	Rp -	Rp -	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp. 766,200.

E. 1 Ekuitas awal

Nilai ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 766,200 dan Rp. 194,000.

Defisit LO Rp. -60,524,552.

E. 2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. -60,524,552 dan Rp. -70,140,430. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/deficit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp. 0.

E. 3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tidak terdapat transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020.

Penyesuaian Nilai Aset Rp. 0.

E. 3.2 Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Penyesuaian Nilai aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Nilai Persediaan Rp. 0.

E. 3.3 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya.

Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk tahun 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Rincian Koreksi Nilai Persediaan untuk tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Rincian Koreksi Nilai Persediaan

Jenis Persediaan	Koreksi
Barang Konsumsi	-
Suku Cadang	-
Jumlah	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Selisih Revaluasi
Aset Tetap Rp. 0.

E. 3.4 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 0.

Rincian Koreksi Aset Tetap Revaluasi

Jenis	Koreksi
Tanah	-
Gedung dan Bangunan	-
Jumlah	-

Koreksi Aset
Tetap Non
Revaluasi Rp. 0.

E. 3.5 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Jenis	Koreksi
Penyusutan Gedung dan Bangunan	-
Koreksi Nilai Saldo Awal	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain
Rp. 0.

E. 3.6 Koreksi Lain-Lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp. 0 dan Rp. 0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

Transaksi Antar
Entitas Rp.
60,153,852.

E. 4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 60,153,852 dan Rp. 70,712,630.

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Transaksi antar entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Transaksi Antar Entitas

Jenis Beban	Koreksi
Diterima dari Entitas Lain	(38,120,000)
Ditagihkan ke Entitas Lain	92,905,800
Transfer Masuk	5,368,052
Transfer Keluar	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	-
Jumlah	60,153,852

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari :

E. 4.1 Transaksi Antar Entitas

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2021, DDEL sebesar Rp. -38,120,000 sedangkan DKEL sebesar Rp. 92,905,800.

E. 4.2 Transfer Masuk / Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 5,368,052. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0.

E. 4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengesahan Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0 dari total Rp. 0 yang diterima sepanjang tahun 2021.

Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 adalah Rp. 0.

Ekuitas Akhir Rp. 395,500.

E. 5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp. 395,500 dan Rp. 766,200.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

- 1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK
Pengadilan Negeri Purbalingga tidak ada Temuan dan Tindak Lanjut atas Temuan BPK yang dapat disajikan dalam laporan ini.
- 2 Rekening Pemerintah
Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Purbalingga adalah sebagai berikut :
 1. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Virtual Account 653240980361000 a.n BPG 029 PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-
 2. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Virtual Account 654440991261000 a.n BPG 029 PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 0,-
 3. PT. Bank BTN Cab. Purwokerto A/C 000000-33-01-000516-3 a.n RPL 029 PN PURBALINGGA Utk PDT Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3 dengan saldo akhir per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 1.125.860.427,72
- 3 Pengungkapan Pengelolaan Uang Titipan Pihak ke-3
Informasi mengenai saldo akhir biaya perkara dapat dijabarkan sebagai berikut:
 1. Biaya Perkara yaitu sebesar Rp. 41.385.511
 2. Biaya Konsinyasi yaitu sebesar Rp. 1.032.283.553,72
 3. Biaya Eksekusi yaitu sebesar Rp. 57.111.400
- 4 Pengelola Keuangan Satker Pengadilan Negeri Purbalingga
Pengelola Keuangan pada Kantor Pengadilan Negeri Purbalingga Tahun Anggaran 2021 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya sebagai berikut :

Kuasa Pengguna Anggaran	:	Baiti Harfiah, SH
Pejabat Pembuat Komitmen	:	Baiti Harfiah, SH
PPSPM	:	Darisman
Bendahara	:	Purwanto, SE
PPBJ	:	Paung Indra Wardana, SE

LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM 03
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA 099126

Kode Lap : LRA.F.S
Tanggal : 23/01/22 8:34 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_face_satker_komparatif --

NO	URAIAN	2021				2020			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH)	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
A	PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH				0				0
	PENERIMAAN PERPAJAKAN	0	0	0	0	0	0	0	0
	PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	28,550,000	38,120,000	9,570,000	134	30,834,000	32,615,500	1,781,500	106
	PENERIMAAN HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH PENDAPATAN DAN HIBAH	28,550,000	38,120,000	9,570,000	134	30,834,000	32,615,500	1,781,500	106
B	BELANJA				0				0
	BELANJA PEGAWAI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BARANG	95,468,000	92,905,800	(2,562,200)	97	100,379,000	98,459,750	(1,919,250)	98
	BELANJA MODAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA PEMBAYARAN KEWAJIBAN UTANG	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA SUBSIDI	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA HIBAH	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA BANTUAN SOSIAL	0	0	0	0	0	0	0	0
	BELANJA LAIN-LAIN	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	95,468,000	92,905,800	(2,562,200)	97	100,379,000	98,459,750	(1,919,250)	98
C	PEMBIAYAAN				0				0

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER DESEMBER 2021 DAN 2020
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005	MAHKAMAH AGUNG	
UNIT ORGANISASI : 03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	
KDUAPPAW : 005030300KD	BA(005) ES1(03) JAWA TENGAH	
KODE SATKER : 099126	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	

Tgl. Cetak 23/01/2022 8:25 PM
lap_neraca_satker_komparatif --rekon17

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2021	2020	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	395,500	766,200	(370,700)	(48.38)
JUMLAH ASET LANCAR	395,500	766,200	(370,700)	(48.38)
JUMLAH ASET	395,500	766,200	(370,700)	(48.38)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	395,500	766,200	(370,700)	(48.38)
JUMLAH EKUITAS	395,500	766,200	(370,700)	(48.38)
JUMLAH EKUITAS	395,500	766,200	(370,700)	(48.38)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	395,500	766,200	(370,700)	(48.38)

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LO.SAT
ESELON I	: 03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	Tanggal : 24/01/22 11:14
WILAYAH/PROVINSI	: 0300	JAWA TENGAH	Halaman : 1
SATUAN KERJA	: 099126	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	Prg ID : lap_lo_satker --
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	38,120,000	32,615,500	5,504,500	16.877
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	38,120,000	32,615,500	5,504,500	16.877
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	38,120,000	32,615,500	5,504,500	16.877
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	0	0	0	
Beban Persediaan	48,038,752	47,309,880	728,872	1.541
Beban Barang dan Jasa	29,775,800	34,761,550	(4,985,750)	(14.343)
Beban Pemeliharaan	0	0	0	
Beban Perjalanan Dinas	20,830,000	20,930,000	(100,000)	(0.478)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN	: 005	MAHKAMAH AGUNG	Kode Lap : LO.SAT
ESELON I	: 03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	Tanggal : 24/01/22 11:14
WILAYAH/PROVINSI	: 0300	JAWA TENGAH	Halaman : 2
SATUAN KERJA	: 099126	PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA	Prg ID : lap_lo_satker --
JENIS SATUAN KERJA	: KD		Tgl Data : 20/05/19 12:00 AM

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	0	0	0	
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	98,644,552	103,001,430	(4,356,878)	(4.23)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(60,524,552)	(70,385,930)	9,861,378	(14.01)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	245,500	(245,500)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	437,300	(437,300)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	191,800	(191,800)	(100)
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	245,500	(245,500)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(60,524,552)	(70,140,430)	9,615,878	(13.709)
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(60,524,552)	(70,140,430)	9,615,878	(13.709)

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
TINGKAT SATKER
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021 DAN 2020
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
JENIS SATUAN KERJA : KD
SATUAN KERJA : 099126 PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Kode Lap : LPE.SATKER
Tanggal : 21/01/22 3:59 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lpe_satker --rekon17

URAIAN	2021	2020	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	766,200	194,000	572,200	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(60,524,552)	(70,140,430)	9,615,878	-
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	0	0	0	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0	0	0	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	0	0	0	-
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	-
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	60,153,852	70,712,630	(10,558,778)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(370,700)	572,200	(942,900)	-
EKUITAS AKHIR	395,500	766,200	(370,700)	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0300 BA(005) ES1(03) JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 099126 PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA
JENIS SATUAN KERJA : KD

Kode Lap : LRA.B.S.
Tanggal : 23/01/22 8:37 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun --
Tgl Data : 20/5/19 12:00 AM

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4,000,000	3,178,000	1,855,800	0	1,855,800	58.4	1,322,200
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	4,000,000	3,178,000	1,855,800	0	1,855,800	58.4	1,322,200
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	47,265,000	6,600,000	6,350,000	0	6,350,000	96.21	250,000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	0	450,000	450,000	0	450,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	47,265,000	7,050,000	6,800,000	0	6,800,000	96.45	250,000
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	19,200,000	42,300,000	42,300,000	0	42,300,000	100	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	19,200,000	42,300,000	42,300,000	0	42,300,000	100	0
5221	Belanja Jasa							
522131	Belanja Jasa Konsultan	21,600,000	21,150,000	21,120,000	0	21,120,000	99.86	30,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	21,600,000	21,150,000	21,120,000	0	21,120,000	99.86	30,000
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	28,940,000	21,790,000	20,830,000	0	20,830,000	95.59	960,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	28,940,000	21,790,000	20,830,000	0	20,830,000	95.59	960,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	121,005,000	95,468,000	92,905,800	0	92,905,800	97.32	2,562,200
	JUMLAH BELANJA	121,005,000	95,468,000	92,905,800	0	92,905,800	97.32	2,562,200

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
MENURUT KELOMPOK PENDAPATAN / AKUN
TINGKAT SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2021
(dalam rupiah)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 005 MAHKAMAH AGUNG
ESELON I : 03 DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
WILAYAH/PROVINSI : 0300 JAWA TENGAH
SATUAN KERJA : 099126 PENGADILAN NEGERI PURBALINGGA

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 23/01/22 8:52 PM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_satker --

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4252	Pendapatan Administrasi Dan Penegakan Hukum					
425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	50,000	0	0	0	0
425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitera Badan	200,000	10,000	0	10,000	5
425233	Pendapatan Ongkos Perkara	5,800,000	5,770,000	0	5,770,000	99.48
425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	22,500,000	32,340,000	0	32,340,000	143.73
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4252	28,550,000	38,120,000	0	38,120,000	133.52
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	28,550,000	38,120,000	0	38,120,000	133.52
	JUMLAH PENDAPATAN	28,550,000	38,120,000	0	38,120,000	133.52

**KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT SATKER
PERIODE TAHUNAN TA. 2021**

Kode BA dan Nama BA : (005) Mahkamah Agung RI

Kode Es1 dan Nama Es1 : (03) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

Kode Wilayah dan Nama Wilayah : (097713) Pengadilan Tinggi Semarang

Kode Satker dan Nama Satker : (099126) Pengadilan Negeri Purbalingga

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Tidak	Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok (<i>Hardcopy</i>)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2. LRA, Neraca, LO dan LPE <i>face</i>	✓		Ada
3. Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan			
1. Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
2. Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
3. Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN HARDCOPY DENGAN E-REKON&LK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Apakah semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan e-Rekon&LK termasuk perbandingan dengan tahun 2021?	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan e-Rekon&LK sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>			
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Neraca <i>Balance</i>	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Satker Neracanya tidak <i>balance</i> ? Cek di e-Rekon&LK melalui menu "Daftar >> Neraca Tidak <i>Balance</i> "		✓	Tidak
Saldo antar Laporan	Sama	Tidak	Seharusnya
2. Apakah Nilai " <i>Surplus/(Defisit)-LO</i> " di LO = Nilai " <i>Surplus/ (Defisit) - LO</i> " di LPE	✓		Sama

3. Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
Apabila terjadi, biasanya karena ada akun-akun yang tidak ada dalam Referensi sehingga tidak terkalkulasi			
NERACA PERCOBAAN AKRUAL			
PENGECEKAN SALDO YANG TIDAK NORMAL DAN TIDAK ADA REFERENSINYA	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau "uraian tidak ada" ? (Cek di e-Rekon&LK, menu Daftar >> Akun Non Ref)		✓	Tidak
2. Adakah "Saldo Tidak normal"? (Cek e-Rekon&LK, menu "Daftar >> Saldo Tidak Normal"), kecuali akun "Beban Penyisihan Piutang" dan "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		✓	Tidak
TELAH PER AKUN PADA NERACA PERCOBAAN			
AKUN ASET (1xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun Aset (1xxxxx) yang semestinya tidak terdapat di K/L tersebut, misal Persediaan Amunisi yang ada di Kementerian Kesehatan, atau persediaan Bansos di LIPI, atau Piutang BLU layanan Kesehatan di Kemenristek Dikti.		✓	Tidak
2. Adakah Akun 1111xx hingga 1115xx? (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya adalah akun BUN)		✓	Tidak
Akun Dibayar dimuka (prepaid) dan Uang Muka Belanja Khusus BUN (Transaksi Hibah, Bunga, Subsidi, Lain-lain, dan Transfer merupakan Transaksi BUN)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)	N/A	N/A	Tidak
2. Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain	N/A	N/A	Tidak
AKUN KEWAJIBAN (2xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		✓	Tidak
Telaah Akun Hibah Langsung Yang Belum Disahkan (akun 218211)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)	N/A	N/A	Ya/Tidak
2. Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada akhir tahun 2020? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan)	N/A	N/A	Ya
3. Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A	N/A	Tidak
Sehubungan terbitnya Surat S-1815/PB/2020 ttg Penyelesaian Hibah Langsung Bentuk Uang/Barang/Jasa/ Surat Berharga Tahun Anggaran Yang Lalu, satker yang memiliki hibah langsung TAYL diwajibkan untuk mengesahkan pendapatan hibahnya sehingga saldo akun hibah langsung yang belum disahkan pada laporan keuangan Tahunan adalah Hibah Tahun Anggaran Berjalan yang belum disahkan.			
4. Jika ada akun 111827-Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan, apakah nilainya ≤ akun 218211 ?	N/A	N/A	Ya
AKUN EKUITAS (3xxxxx)	Ada	Tidak	Seharusnya

1.	Adakah akun 391117-Penyesuaian Nilai Persediaan		✓	Tidak
2.	Adakah akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI		✓	Tidak
3.	Adakah Saldo akun 391114-Revaluasi Aset Tetap		✓	Tidak
4.	Adakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya		✓	Ada/Tidak
5.	Jika ada, Apakah Saldo akun 391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya berasal dari transaksi reklasifikasi Aset Tetap /Aset Lainnya dengan masa manfaat yang berbeda dan/atau reklasifikasi persediaan menjadi aset ekstrakomptabel atau sebaliknya			Ya
6.	Apakah Saldo akun 391131-Pengesahan Hibah Langsung ≥ akun 111822-Kas Lainnya di Kementerian Negara/ Lembaga dari Hibah			Ya

saldo akun 391151 hanya berasal dari selisih akumulasi penyusutan aset yang dilakukan reklas keluar dan reklas masuk. Nilai **aset** yang direklas keluar dan direklas masuk semestinya sama. Selisih transaksi reklas keluar dan reklas masuk aset tetap/persediaan bisa ditelusuri dari menu jurnal penyesuaian di Aplikasi E-rekon

Akun 313221-Transfer Masuk (TM) dan akun 313211-Transfer Keluar (TK)			
1.	Nilai absolut selisih transfer keluar dan transfer masuk pada excel monitoring TK/TM & Rekon&LK		-
	Selisih secara absolut diperoleh dari e-rekon&LK (menu monitoring >> Transfer Masuk/Keluar), dengan mengurangi kolom TK dengan kolom TM, kemudian hasilnya diabsolutkan (yang hasilnya negatif, dibuat positif). Apakah ada penjelasan secara manajemen penyebab selisih TKTM secara absolut tsb ?		
2.	Nilai selisih TK/TM secara Neto/Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan		#REF!
AKUN PENDAPATAN (4xxxxx)			
Akun Pendapatan Perpajakan (41xxxx)		Ada	Tidak Seharusnya
1.	Adakah akun 41xxxx-Pendapatan Perpajakan kecuali BA.015.04 ?		✓ Tidak
Ketepatan penggunaan Akun PNPB Baru (Kepdirjen 211/PB/2018 BAS)		Ada	Tidak Seharusnya
1.	Adakah akun 423xxx		✓ Tidak
2.	Adakah akun 421xxx khusus BUN? Yaitu 421111, 421211, 421621		✓ Tidak
3.	Adakah akun 422xxx khusus BUN? Yaitu 4221xx		✓ Tidak
4.	Adakah akun 425xxx khusus BUN? Antara lain 425143, 425144, 425161, 425162, 425745, 425772, 425773, 425774, 425815, 425816, 425998		✓ Tidak
Akun Penerimaan Kembali Belanja Khusus BUN		Ada	Tidak Seharusnya
1.	Adakah Akun 425914/5/6/8/9 Penerimaan kembali belanja Kewajiban Utang/Subsidi/hibah/ lain-lain/transfer TAYL		✓ Tidak
Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas		Ada	Tidak Seharusnya
1.	Adakah akun yang tidak normal keberadaannya?, misalnya pendapatan SIM/STNK/Kejaksaaan terdapat pada Kementerian Kesehatan		✓ Tidak
2.	Adakah akun 425719-Pendapatan Bunga Lainnya Di KL? seharusnya 425764-Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)		✓ Tidak
Akun Pendapatan Hibah (43xxxx)		Ya	Tidak Seharusnya
1.	Adakah akun 43xxxx-Pendapatan Hibah		✓ Tidak
Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak Seharusnya

1. Apakah ada akun 491429-Pendapatan Perolehan Aset Lainnya?		✓	Ya/Tidak
2. Jika ada, apakah benar? <i>(Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)</i>		✓	Ya/Tidak
AKUN BELANJA (5xxxxx)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 54/55/56/57xxxx (Beban Bunga, Subsidi, Hibah, lain-lain) ?		✓	Tidak
TELAAH TERKAIT BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan"		✓	Tidak
2. Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada Aplikasi e-rekon? <i>(cek pada Aplikasi e-Rekon pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)</i>		✓	Tidak
Jika bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 424xxx-Pendapatan BLU		✓	Tidak
2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)		✓	Tidak
3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)		✓	Tidak
Telaah Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 491511	-		
2. Isi kolom di sebelah kanan saldo akun 593311	-		
3. Isi kolom di sebelah kanan hasil dari akun 491511 dikurangi akun 593311	-		
4. Apakah nilai angka 1, 2, dan 3 diatas normal ? Tidak terlalu besar atau terlalu kecil?		✓	Tidak
Untuk mengetahui apakah selisih tsb. Wajar, dapat dengan cara: membandingkan dengan tahun lalu, men-sort ascending per satker dan menelaah apakah normal (misalnya satker kecil namun nilainya lebih besar dari Satker Besar), atau membuat benchmark per Satker kecil/satker besar dan cara2 lainnya.			
5. Adakah akun 491511/593311 yang berasal dari transaksi Reklas Keluar (K10)/Reklas Masuk(M07)		✓	Tidak
Jenis Transaksi K10-Reklas Keluar dan M07-Reklas Masuk seharusnya menghasilkan akun "391151-Koreksi atas Reklasifikasi Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya". Jika masih terdapat Jenis transaksi tersebut yang menghasilkan 491511/593311, satker tersebut belum melakukan update Aplikasi persediaan dan melakukan pengiriman ulang dari bulan januari. Untuk menelusuri dapat dilakukan dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian filter Jenis Transaksi K10/M07			
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan (Kecuali BA.015)		✓	Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah		✓	Tidak
3. Adakah beban bunga		✓	Tidak
4. Adakah beban subsidi		✓	Tidak
5. Adakah beban hibah		✓	Tidak
6. Adakah beban transfer		✓	Tidak
7. Adakah beban lain-lain		✓	Tidak

Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya (saldo akun "null" biasanya disebabkan karena belum dilakukan update aplikasi)		✓	Tidak
9. Apakah seluruh akun bernilai positif, kecuali Beban Penyisihan Piutang	✓		Ya

Seluruh Akun LO Nilai Normalnya adalah Positif (baik pada Kegiatan Operasional, Non Operasional maupun Pos Luar Biasa), kecuali beban penyisihan piutang **dapat** bernilai negatif. (yang harus positif adalah akunnya, sedangkan penjumlahan/sub penjumlahan pada LO dapat bernilai Negatif).

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015	Ya	Tidak	Seharusnya
10. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO	✓		Ya

Jika hasil diatas "tidak", maka cek apakah ada penghapusan piutang dan/atau koreksi piutang senilai selisih diatas. Jika tidak ada, kemungkinan salah dalam menjurnal penyisihan piutang.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada saldo pos "Selisih Revaluasi Aset"		✓	Tidak
Jika ada, telusuri saldo tersebut terdapat di satker mana melalui aplikasi e-rekon kemudian pastikan kebenaran dokumen sumbernya.			
2. Pada LPE, apakah "Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	✓		Sama

Apabila perhitungan no.2 menghasilkan "tidak sama" berarti ada Satker melakukan jurnal menggunakan akun 391111

Pengecekan akun koreksi	Ya	Tidak	Seharusnya
Cek seluruh akun koreksi yaitu 391113, 391114, 391116, 391118 dan 391119			
1. Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud ?	✓		Ya
Contoh 1 : Pengungkapan 391116 (Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi) senilai Rp 151.500.000 disebabkan oleh Transaksi Saldo Awal (100) senilai Rp100.000.000, Transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas (204) Rp 51.500.000 dengan dokumen sumber BAST.			

Contoh 2 : Pengungkapan akun 391119-Koreksi lainnya senilai Rp 23.500.000 disebabkan oleh adanya kesalahan pencatatan utang senilai Rp23.000.000 dan pencatatan piutang senilai 500.000 di tahun anggaran yang lalu sehingga dilakukan dikoreksi di tahun berjalan.

NERACA

	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	✓		Ya
2. Apakah ada Penjurnalan akun "Belum Diregister" yang dipasangkan dengan beban ?		✓	Tidak

Pastikan tidak terdapat jurnal manual yang dilakukan oleh operator dalam rangka menghilangkan Akun belum diregister dengan memasangkannya dengan akun beban yang disebabkan karena kesalahan akun belanja. Jurnal tersebut dapat ditelusuri dengan mencetak excel "Jurnal Umum Penyesuaian" di menu "daftar" di Aplikasi e-Rekon kemudian memilih jenis jurnal "ALL" atau "JRNADJ" dan "JRNUMUM", kemudian filter kode akun register (D/K) dan Akun Beban (D/K)

Dari kolom perbandingan antara 30 September 2021 dengan 31 Desember 2020			
3. adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar (terlalu tinggi/rendah) tanpa penjelasan?		✓	Tidak
4. Normalnya total ASET akan naik dibanding Audited 2020, Apakah demikian?		✓	Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN			
<i>Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"</i>			
Pengecekan Saldo Kas di Bendahra Pengeluaran	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran = LPJ Bendahara dan Aplikasi Silabi ?	✓		Ya
Pengecekan telah melakukan penyisihan piutang	Ada	Tidak	Seharusnya
2. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun:		✓	Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan TP/TGR (Neraca)		✓	Ada
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)		✓	Ada
Pengecekan telah melakukan reklasifikasi piutang jk. Panjang	Ada	Tidak	Seharusnya
3. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun:		✓	Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		✓	Ada
Pengecekan persediaan	Ada	Tidak	Seharusnya
4. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:	✓		Ada/Tidak
- Beban Persediaan (di LO)	✓		Ada
- 491511-Pendapatan Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	✓		Ada/Tidak
- 593311-Beban Penyesuaian Persediaan di Neraca Percobaan	✓		Ada/Tidak
Pengecekan penyusutan aset tetap	Ada	Tidak	Seharusnya
5. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:	✓		Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL (Neraca)	✓		Ada
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	✓		Ada
<i>Mulai tahun 2018 dengan e-Rekon&LK G2 dimungkinkan ada Satker yang lupa melakukan penyusutan/amortisasi Semester II</i>			
Pengecekan Beban Diserahkan ke Masyarakat & Beban Bansos	Ada	Tidak	Seharusnya
6. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?		✓	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx pada neraca percobaan kas ?		✓	Ya
7. Adakah beban bansos?		✓	Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx pada neraca percobaan kas ?		✓	Ya
Pengecekan Jurnal Akrual	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492x) ?	✓		Ada/Tidak
- Adakah akun 219211-Pendapatan sewa diterima Dimuka pada Neraca ?	✓		Ada/Tidak
9. Adakah realisasi 522141-Belanja Sewa di Neraca Percobaan Kas () ?	✓		Ada/Tidak
- Adakah belanja Barang dibayar dimuka pada Neraca		✓	Ada/Tidak
10. Adakah realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9) ?	✓		Ada/Tidak

- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar pada Neraca	√		Ada
KESESUAIAN DENGAN L-BMN			
Rekon Internal LKKL dengan L-BMN	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
1. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Sawal di e-Rekon&LK?		√	Tidak
2. Apakah ada selisih Saldo pada Rekon Internal Bulan September 2021 di e-Rekon&LK?		√	Tidak
<i>Pada e-Rekon&LK G2 lihat menu "Monitoring BMN>> Rekap Rekon Internal dan Rekap Rekon Internal Sawal"</i>			
Apakah menurut e-Rekon-lk terdapat Jurnal Tidak lazim (menu Daftar >> Jurnal		√	Tidak
3. Tidak Lazim) yaitu jurnal dengan akun Persediaan/Aset yang seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi SIMAK ?			
4. Jika ada, apakah jurnal tersebut telah benar?	N/A	N/A	Ya
Validasi Transaksi BMN Pada Aplikasi e-Rekon	Ada	Tidak	Seharusnya
Apakah terdapat transaksi BMN yang terkena validasi pada Aplikasi e-Rekon&LK		√	
1. yang meliputi , Nilai Perolehan Minus, Nilai Buku Minus dll. (Masuk ke Aplikasi e-Rekon&LK, kemudian pilih "daftar BMN")			
LAPORAN REALISASI ANGGARAN			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pagu Minus? (Cek melalui e-Rekon-lk menu daftar >> pagu minus")		√	Tidak
2. Adakah uraian jenis belanja "tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas?		√	Tidak
Pengecekan TDK			
1. Adakah TDK Belanja Netto baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
2. Adakah TDK Pendapatan Netto di Satker Aktif, Tidak Aktif dan tidak aktif bersaldo ?		√	Tidak
3. Adakah TDK Pendapatan MPHL-BJS		√	Tidak
4. Adakah TDK Kas di Bendahara BLU baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
5. Adakah TDK Kas di Bendahara Pengeluaran baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
6. Adakah TDK Kas Hibah baik di Satker Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo		√	Tidak
<i>e-Rekon&LK Menu Monitoring >> Transaksi Dalam Konfirmasi" atas seluruh jenis TDK baik pada Satker DIPA Aktif, Tidak Aktif Bersaldo dan tidak aktif tidak bersaldo</i>			
PENGAWASAN TEMUAN BPK TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA			

Telaah ini bertujuan meminimalisir adanya temuan tahun lalu yang belum diselesaikan dan terjadinya temuan yang berulang. Dibawah ini adalah contoh-contoh telaahnya.

Pertanyaan berdasarkan temuan-temuan BPK tahun-tahun lalu (Disesuaikan dengan kondisi masing-masing satker)	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah sudah dibuat Berita Acara <i>Stock Opname</i> Persediaan ?		✓	Tidak
2. Apakah semua jurnal manual di SAIBA telah dibuatkan Memo Penyesuaian beserta dokumen pendukung terkait?	✓		Ya
3. Masih adakah kesalahan akun belanja Persediaan		✓	Tidak
4. Apakah PNPB telah disetor tepat pada waktunya (tidak terlambat)	✓		Ya
5. Adakan PNPB digunakan langsung?		✓	Tidak
6. Apakah seluruh pendapatan dan Belanja BLU telah disahkan (di-SP3B-BLUkan)?	✓		Ya
7. Apakah seluruh hibah langsung telah disahkan (di-SP2HL-kan)?	✓		Ya
8.			Ya

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Kesesuaian antara Face Laporan dan CaLK	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)	✓		Sama
<i>Masih sering ditemukan kesalahan ketik nilai2 yang seharusnya dituliskan di CaLK.</i>			
Kecukupan pengungkapan pada CaLK (Bila akun tsb ada)	Ya/Ada	Tidak	Seharusnya
2. Apakah pengungkapan Revaluasi BMN telah sesuai baik pada Penjelasan Umum, LO, LPE dan Neraca ?	✓		Ya
3. Apakah pengungkapan dan ikhtisar Transaksi yang bersumber dari PHLN telah secara memadai sesuai format ?	✓		Ya
4. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai?	✓		Ya
5. Apakah ada penjelasan akun "Dana Yang Dibatasi Penggunaannya" ?	✓		Ada
<i>Akun Kas dan Akun lainnya yang substansinya merupakan Kas adalah akun yang "sensitif", pastikan kebenaran seluruh akun tsb., bila perlu bandingkan dengan LPJ Bendahara dan Rekening Koran.</i>			
7. Apakah terdapat penjelasan akun Hibah Langsung yang Belum Disahkan ?	✓		Ya
8. Apakah format dan penjelasan akun-akun LPE telah sesuai? Terutama penjelasan akun Koreksi?	✓		Ya

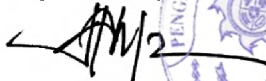
ANALISIS LAINNYA

Analisis Laporan Keuangan Lainnya	Ya	Tidak	Seharusnya
1. Apakah Realisasi Belanja 51 + 525111 = Beban Pegawai pada Laporan Operasional	✓		Ya
2. Apakah realisasi belanja 53 = (Pembelian Aset Tetap+Perolehan KDP+Pengembangan KDP)-Hibah Langsung Barang	✓		Ya
3. Apakah Beban Penyusutan/Amortisasi = Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Triwulan II 2021 - Saldo Awal Penyusutan/Amortisasi 2021	✓		Ya
4. Apakah Beban Persediaan = Saldo Awal + Pembelian - Saldo Akhir (<i>rumus perhitungan beban persediaan terlampir</i>)	✓		Ya

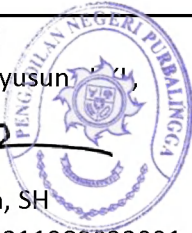
Analisis Laporan Keuangan Lainnya dimungkinkan menghasilkan perhitungan yang tidak sama dengan rumus. Namun perlu dianalisis penyebab selisihnya. Analisis dapat dilakukan dengan bantuan ayat Jurnal Penyesuaian (excel) yang tersedia pada Aplikasi e-Rekon&LK.

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

Mengetahui
Pejabat Penyusun



Baiti Harfiah, SH
NIP. 196804211989032001



Purwokerto, 19 Januari 2022
Penelaah,



Purwanto, SE
NIP. 198507072015031001